

## Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Bagi Remaja

Aisha Barokah<sup>1</sup> Emilia Susanti<sup>2</sup> Cindy Febriyani Putri<sup>3</sup> Dearezha Priska<sup>4</sup> Nadila Amri<sup>5</sup>  
Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>  
Email: [ishabrkh19@gmail.com](mailto:ishabrkh19@gmail.com)<sup>1</sup> [emilia.susanti067@gmail.com](mailto:emilia.susanti067@gmail.com)<sup>2</sup>  
[cindyfebriyaniputri@gmail.com](mailto:cindyfebriyaniputri@gmail.com)<sup>3</sup> [dearezhapriska@gmail.com](mailto:dearezhapriska@gmail.com)<sup>4</sup> [naadilaamrii@gmail.com](mailto:naadilaamrii@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum bagi remaja guna menciptakan masyarakat yang patuh hukum. Kesadaran hukum membantu individu memahami hak dan kewajiban mereka serta berpartisipasi dalam penegakan hukum. Upaya meningkatkan kesadaran hukum remaja melalui pendidikan kewarganegaraan melibatkan integrasi teknologi, kritik, diskusi terbuka, pelatihan guru, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum, dan penegakan hukum. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum penting dalam membentuk perilaku hukum yang benar, melibatkan pengetahuan, sikap, dan pola perilaku hukum. Meskipun Pendidikan Kewarganegaraan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum pada remaja, tantangan seperti minat yang beragam, persepsi negatif terhadap hukum, penggunaan bahasa yang tepat, dan koneksi dengan kehidupan nyata perlu diatasi. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memegang peran kunci dalam membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda untuk mencegah kemerosotan moral dan menghadapi tantangan globalisasi.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Remaja, Pendidikan Kewarganegaraan

### Abstract

*The role of Citizenship Education in forming legal awareness for teenagers in order to create a law-abiding society. Legal awareness helps individuals understand their rights and obligations and participate in law enforcement. Efforts to increase teenagers' legal awareness through citizenship education involve the integration of technology, criticism, open discussions, teacher training, legal counseling, legal reform, and law enforcement. Legal awareness and legal obedience are important in forming correct legal behavior, involving knowledge, attitudes and legal behavior patterns. Although Citizenship Education can help increase legal awareness in adolescents, challenges such as diverse interests, negative perceptions of the law, appropriate use of language, and connection to real life need to be addressed. Thus, citizenship education plays a key role in building the concept of law enforcement in the younger generation to prevent moral decline and face the challenges of globalization.*

**Keywords:** Legal Consciousness, Adolescent, Civic Education



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda menjadi awal dalam cita-cita warga negara yang baik. Membangun konsep penegakan hukum pada generasi menjadi usaha dalam pencerdasan kehidupan bangsa yang memiliki pengetahuan tentang konsep penegakan hukum yang baik. Sejalan dengan pesatnya globalisasi, penekanan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda adalah hal yang penting. Konsep penegakan hukum ialah menyeraskan nilai dan kaidah dalam rangka mempertahankan perdamaian. Generasi muda rentan dengan luntarnya jati diri sebagai warga Indonesia. Adanya globalisasi dapat mempengaruhi generasi muda dalam perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Untuk itu,

membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi tantangan global tersebut. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, mereka dapat memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan menumbuhkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan juga memberikan pemahaman tentang konstitusi dan sistem hukum Indonesia, serta pentingnya menaati hukum dan menghadapi konsekuensinya. Ini membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan sosial dan politik sesuai dengan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Pada Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan penggalian sumber-sumber informasi dari berbagai artikel dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Dalam melakukan penelitian pustaka, peneliti merinci dan menganalisis berbagai literatur yang mencakup artikel-artikel ilmiah, buku-buku kajian, serta sumber-sumber pengetahuan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan kerangka konseptual yang diadaptasi dari literatur-literatur terkemuka dalam membangun landasan teoretis penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengenalan tentang Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di diharapkan Menurut Soemantri, (2001:154) ialah sebuah usaha yang dilakukan guna memberikan siswa sebuah pengetahuan serta kemampuan dasar mengenai hubungan mendasar antara warga negara dengan negara dan juga pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945 dan juga Pancasila. Menurut Saidurrahman, Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak Masyarakat. Sedangkan menurut Aziz Wahab, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Katera itu, program PKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hokum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut.

Jika menurut Madiong, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai ketentuan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) adalah upaya sistematis untuk memberi orang pengetahuan, pemahaman, dan sikap tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai demokrasi, dan hak dan kewajiban mereka. PPKN juga bertujuan untuk mendidik generasi muda untuk berpikir kritis, bertindak demokratis, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

### **Pembentukan Sikap dan Perilaku Hukum**

Pembentukan sikap dan perilaku bisa dilakukan melalui:

1. Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku hukum yang benar. Ketika seseorang memiliki kesadaran hukum yang

baik, mereka cenderung untuk memahami aturan hukum yang berlaku, menghormati hukum, bertindak secara etis, menghindari konsekuensi hukum negatif, dan berpartisipasi dalam sistem hukum. Dengan kesadaran hukum yang kuat, individu akan lebih mampu untuk menghindari pelanggaran hukum, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta menggunakan jalur hukum yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan atau melindungi hak-hak mereka. Bagi Ewick dan Silbey, "kesadaran hukum" terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai perilaku", dan bukan "hukum sebagai aturan norma atau asas. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan:

- a. Stabilitas,
- b. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat,
- c. Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma,
- d. Jalinan antar institusi.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Ahmad Ali, mengemukakan bahwa paling ada empat unsur kesadaran hukum, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi hukum;
- c. Sikap hukum;
- d. Pola perilaku hukum.

Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka tentu pandangan tersebut di atas dapat menjadi parameter dalam penegakan hukum. Artinya, bahwa kalau masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang baik pasti akan berpikir seribu kali jika akan melakukan suatu pelanggaran hukum, ia pasti mempunyai sikap yang kooperatif serta berperilaku sesuai dengan aturan main tanpa melanggar baik etika maupun hukum.

2. Ketaatan Hukum. Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. Dalam konteks ini, kesadaran hukum mengacu pada kemampuan individu atau masyarakat untuk memahami dan menghormati hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Ini melibatkan pengetahuan tentang undang-undang, peraturan, dan prosedur hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum juga mencakup penghargaan terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Dengan memiliki kesadaran hukum yang baik, individu atau masyarakat dapat menghindari pelanggaran hukum dan bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.
- b. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum. Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan

manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak di atas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

### **Tantangan dalam Mengintegrasikan Pendidikan PPKn Untuk Kesadaran Hukum Remaja**

Mengintegrasikan pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk meningkatkan kesadaran hukum pada remaja memang memberikan beberapa tantangan. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi:

1. Minat Remaja yang Beragam. Remaja cenderung memiliki minat yang bervariasi dan seringkali mereka kurang tertarik dengan materi yang bersifat normatif atau teoritis seperti hukum. Hal ini bisa membuat sulit untuk menyampaikan konsep-konsep hukum yang kompleks dan penting dalam format yang menarik bagi mereka.
2. Persepsi tentang Hukum. Banyak remaja yang mungkin memiliki persepsi negatif atau skeptis terhadap sistem hukum dan keadilan, baik yang bersumber dari pengalaman pribadi, pengaruh media, atau narasi dalam kelompok peer mereka. Ini bisa menghambat penerimaan positif terhadap pelajaran yang berkaitan dengan hukum.
3. Penggunaan Bahasa yang Tepat. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh remaja tanpa mengurangi keakuratan informasi hukum merupakan tantangan. Bahasa yang terlalu formal atau kompleks bisa membuat materi sulit dicerna.
4. Koneksi dengan Kehidupan Nyata. Membuat materi PPKn relevan dengan kehidupan nyata remaja penting agar mereka dapat melihat manfaat praktis dari memahami dan menghormati hukum. Tanpa koneksi ini, pendidikan hukum bisa terasa abstrak dan tidak relevan.
5. Integrasi Teknologi. Remaja saat ini sangat akrab dengan teknologi. Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran PPKn untuk membuatnya lebih interaktif dan menarik, seperti melalui penggunaan aplikasi, media sosial, atau platform belajar online.
6. Kritik dan Diskusi Terbuka. Mengembangkan lingkungan di mana remaja merasa aman untuk mengungkapkan pendapat dan kritik terhadap hukum dan kebijakan adalah penting, namun juga sulit. Pendidik harus mampu mengelola diskusi yang kritis sambil menjaga suasana yang mendukung dan inklusif.
7. Pelatihan Guru. Guru perlu dilatih tidak hanya dalam materi hukum itu sendiri, tapi juga dalam metode pedagogis yang dapat menggaet minat remaja dan mengajarkan hukum secara efektif. Tantangan ini mencakup juga kebutuhan akan sumber daya, waktu, dan dukungan institusional.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum tidak boleh dilakukan dengan ancaman, bisa juga dengan menegatkan penataan sesuai undang-undang, kesadaran hukum tidak hanya hukum tertulis, ada juga yang masih mengikuti hukum adat karena belum diketahui daerah pedalamannya dengan adanya hukum tertulis. Upaya dalam meningkatkan sebuah kesadaran hukum pada remaja dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Melalui penyuluhan hukum terhadap remaja

2. Melakukan pembaharuan hukum
3. Proses hukum ini juga tidak boleh dilandaskan dengan hal-hal politik
4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
5. Memperbaiki dan Memperkuat institusi pemerintahan yaitu penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kebenaran, keadilan, dan juga kepastian hukum.

### **Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Remaja Melalui Pendidikan Kewarganegaraan**

Dalam beberapa tahun terakhir, perilaku manusia telah terbuka aktivitas sosial orang telah beralih ke online, meninggalkan banyak jejak digital (DeScioli *et al.*, 2011). Untuk itu, diperlukan usaha dalam membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda dapat mencegah adanya kemerosotan moral pada generasi muda. Penegakan Hukum memberikan kepastian hukum (Mahmud & Marzuki, 2012), Maka itu, Membangun konsep penegakan hukum pada generasi menjadi usaha dalam pencerdasan kehidupan bangsa yang memiliki pengetahuan tentang konsep penegakan hukum yang baik. Sementara itu, jejaring social bermanfaat untuk membuat hubungan sosial yang bermakna (Clark *et al.*, 2017). Sejalan dengan pesatnya globalisasi, penekanan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda adalah hal yang penting. Konsep penegakan hukum ialah menyeraskan nilai dan kaidah dalam rangka mempertahankan perdamaian (Hamzah, 2005). Disamping itu, pentingnya tentang membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda adalah juga sebagai cara dalam tumenghadapi tantangan globalisasi. Adanya penegakan hukum yang mengguncang Indonesia tersebut, menjadikan penanaman konsep hukum yang berkeadilan menjadi penting bagi generasi muda.

Era globalisasi memberikan pengaruh yang cukup kuat dengan keterbukaannya. Sedikit pekerjaan dalam konformitas sosial dan komunikasi pada terbukti mempengaruhi kepercayaan manusia (Volante *et al.*, 2018) (Dewantara *et al.*, 2021). Dalam era keterbukaan tersebut, salah satu hal yang terpenting ialah memberikan konsep penegakan hukum pada generasi sebagai usaha dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Generasi muda rentan dengan lunturnya jati diri sebagai warga Indonesia. adanya globalisasi dapat mempengaruhi generasi muda dalam perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila (Maftuh, 2008). Untuk itu, membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi tantangan global tersebut. Secara eksplisit, membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda. Penegakan hukum menjadikan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku (Abidin, 2007). Disamping itu, pentingnya konsep penegakan hukum pada generasi muda ialah mengembalikan fungsi generasi muda sebagai generasi yang menjadi tumpuan dalam meneruskan cita-cita Nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan-warganegara memahami perannya dalam bernegara (Wahab & Sapriya, 2011). Dari hasil penelitian, dapat dilakukan pembahasan bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan ialah dapat membangun konsep penegakan hukum pada generasi muda. Manifestasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kita bekerja, dengan sangat sadar, untuk mendorong kapasitas yang lebih dari sekadar manusia untuk menghadapi bentuk kekerasan lintas kosmologis (Hernández *et al.*, 2020). Peningkatan kesadaran mengenai peran dan tanggung jawab warga negara pada generasi muda dalam bidang hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan generasi muda memiliki arah dalam penentuan sikap sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun konsep penegakan hukum memberikan pengetahuan tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan nilai yang baik pada generasi muda dapat menjadikan mereka sebagai generasi yang baik (Halimah *et al.*, 2021).



## **KESIMPULAN**

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membangun kesadaran hukum pada generasi muda. PKn bukan hanya menyampaikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk berpikir kritis, bertindak demokratis, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hukum, dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada remaja melalui berbagai pendekatan, seperti penyuluhan hukum, pembaharuan hukum, dan pelatihan guru. Namun, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mengintegrasikan PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum pada remaja, termasuk minat yang beragam, persepsi negatif terhadap hukum, penggunaan bahasa yang tepat, dan koneksi dengan kehidupan nyata. Integrasi teknologi, kritik, dan diskusi terbuka juga menjadi faktor penting dalam upaya ini. Upaya meningkatkan kesadaran hukum pada generasi muda melalui PKn juga bertujuan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan mencegah kemerosotan moral. Dengan membangun konsep penegakan hukum yang kuat pada generasi muda, diharapkan mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil dan demokratis.

## **Ucapan Terima Kasih**

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada jurnal ini atas dedikasi dan kontribusinya dalam membagikan pengetahuan yang berharga kepada komunitas ilmiah. Terima kasih telah memberikan platform untuk berbagi ide, penelitian, dan pemikiran yang menginspirasi. Semoga jurnal ini terus menjadi wahana yang mencerahkan dan memberi dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas kerja keras dan komitmen yang telah ditunjukkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.W. Widiya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1984)  
Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 1998)  
Agenda Prodi PPKn FIS UNJ, *Pancasila And Civics Education*, 6 September 2022  
Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*  
Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence, Kencana, 2009)  
Damianus Agus Sido, Dalintang Ketut Dwi Saputri , Anita Trisiana. *Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja Untuk Menanggulangi Pengaruh Globalisasi*  
Dyah Listyorini. dkk., *Penerapan Pendidikan Hukum pada Sistem SMA dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum di SMA Muhammadiyah 2 Semarang*, Jurnal: Komunikasi Hukum. Vol. 8 No. 2, Agustus 2022.  
Tweede Rhamadaniar Subagio & Meiwatizal Trihastuti, *Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Konsep Penegakan Hukum Pada Generasi Muda*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 2 Desember 2021